



**P E N E T A P A N**

**Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Stn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jember, 10 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Astra Internasional TBK Honda, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email XXXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sorong, 02 September 1976, agama Protestan, pekerjaan PNS DPMPTSP, pendidikan S1, tempat kediaman Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Stn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Senin, tanggal 20 Oktober 2014 M, bertepatan dengan 25 Dzulhijjah 1435 H, yang

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2022/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX Tertanggal 20 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, kurang lebih 3 bulan, kemudian pada awal 2015 Penggugat dan tergugat pindah ke XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
  3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 6 tahun anak tersebut saat ini berada pada asuhan Penggugat;
  4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak akhir 2017 yang dikarenakan;
    - a. Tergugat beberapa mengonsumsi minuman beralkohol;
    - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat
    - c. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat tentang penghasilan pekerjaan Tergugat;
  5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2022, dimana Penggugat melihat Tergugat keluar dari Gereja namun Tergugat tidak mengakui kepada Penggugat;
  6. Bahwa selama terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;
  7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
  8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2022/PA.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan memfasakh pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT));
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim membacakan relaas Panggilan Tergugat, bahwa Tergugat tidak ditemukan di alamat yang telah diberikan oleh Penggugat, serta menurut kepala kampung Doyo Baru menerangkan bahwa Tergugat bukanlah warga dari kampung Doyo Baru. Kemudian Hakim memberikan nasihat dan penjelasan kepada Penggugat, bahwa dalam sebuah gugatan, alamat Tergugat haruslah jelas;

Bahwa, Atas nasihat dan penjelasan Hakim, Penggugat menyatakan mencabut permohonannya dan akan mencari alamat sesungguhnya Tergugat maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2022/PA.Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Hakim menjelaskan bahwa Tergugat tidak dapat ditemukan pada alamat yang telah diberikan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa karena penjelasan Hakim, Penggugat mencabut gugatannya dan akan mencari terlebih dahulu alamat dimana tergugat sekarang bertempat tinggal, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2022/PA.Str



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Stn dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

*Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Suharianis, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Tunggal,

ttd

**Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.**

Panitera,

ttd

**Suharianis, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2022/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2022/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)